

BAB V

PENGARUH KONFLIK INTERNAL PPP TERHADAP PEROLEHAN KURSI PADA PEMILU 2019

5.1 Konflik DPP PPP

5.1.1 Konflik Struktural

Pasca polemik kehadiran SDA dalam kampanye Gerindra pada 23 maret 2014, suasana partai menjadi kurang kondusif. SDA seolah-olah memosisikan dirinya sebagai individu yang berada di atas konstitusi (AD/ART) PPP ia menempatkan dirinya lebih penting dari PPP dan semua aturan yang sudah di sepakati Bersama.

SDA sudah bertindak layaknya tangan besi, dan mencoba untuk menjadi ‘diktator’ dia memecat semua orang yang tidak sepaham dengan dirinya dia lupa, jika PPP adalah partai besar dengan sejarah panjang perjuangannya. PPP adalah partai yang berdiri dari berbagai elemen penting umat Islam. Dalam sejarahnya, PPP berjuang dengan kolektivitas dan kebersamaan. Cara ini juga yang membuat PPP *survive* dalam berbagai kondisi politik yang ada.⁴⁷

Kisruh pascakehadiran Ketua Umum PPP, SDA, di kampanye Gerindra berubah menjadi mosi tidak percaya dari berbagai elemen PPP, baik di tingkat DPP maupun DPW pada 15 April 2014, mosi tidak percaya datang dari Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi.

⁴⁷ Ach Baidowi, *Musibah Partai Kakbah Potret Perjalanan PPP 2014-2019* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), hlm. 11.

Mosi tidak percaya tersebut disampaikan Emron di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat tidak sendirian, mosi tidak percaya tersebut diikuti oleh perwakilan 26 DPW PPP dengan menggelar konferensi pers soal mosi tidak percaya kepada SDA selaku Ketua Umum. Mosi tidak percaya bagi mereka merupakan bentuk kecintaan kepada PPP. Mereka ingin SDA selaku Ketua Umum bertindak sesuai dengan koridor organisasi yang ada.⁴⁸

Kisruh semakin memanas. Upaya penggulingan Suryadharma dibalas dengan pemecatan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Suharso Monoarfa dan enam pengurus provinsi. "Surat pemecatan sudah ditandatangani tadi pagi oleh ketua umum dan wakil sekjen," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha, Rabu, 16 April 2014.

Dia mengatakan pemecatan dilakukan karena kader PPP ini tidak melaksanakan keputusan untuk mengawal perolehan suara. Kader yang dipecat oleh Suryadharma Ali antara lain Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noe, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, Ketua DPW Sumatera Utara Fadly Nursa, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaluddin.

Syaifullah mempersilakan kader yang dipecat ini untuk menggugat keputusan tersebut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk mengambil keputusan dalam keadaan mendesak.

⁴⁸ *Ibid*, h. 12.

Menurut dia, pengambilan keputusan bisa dilakukan tanpa melalui rapat pengurus harian. Syaifullah mengkritik sikap Suharso yang lebih sibuk membicarakan calon presiden ketimbang mengawal perolehan suara.⁴⁹

Setelah melakukan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa, pada 18 April 2014, tanpa melalui rapat Pengurus Harian DPP, SDA kembali melakukan pemecatan terhadap M. Romahurmuziy sebagai Sekjen DPP PPP dengan mengantinya dengan Isa Muchsin. Hal ini semakin menambah runcing perpecahan dalam tubuh PPP.

Pada 18 April 2014 pukul 19.30 WIB, Pengurus Harian DPP PPP menggelar rapat yang Kuorum di kantor DPP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. Pada rapat tersebut diputuskan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 pada 19-20 April 2014. Dalam Rapimnas itulah, keluar keputusan pemberhentian sementara terhadap Ketua Umum SDA dan mengangkat Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.

Adapun Rapat Pengurus Harian pada 18 April tersebut melahirkan 11 butir keputusan sebagai berikut :

1. Bahwa kehadiran dan orasi politik Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam kampanye terbuka 23 Maret 2014 di SUGBK adalah langkah politik yang salah, melanggar etika/fatsoen

⁴⁹ Tempo.co, “6 Cerita Menmengejutkan di Balik Konflik PPP,” (<https://nasional.tempo.co/read/571867/6-cerita-mengejutkan-di-balik-konflik-ppp/full&view=ok>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 03.32)

politik, mempertontonkan perilaku yang *over acting* dan menjatuhkan moral kader partai di semua tingkatan, merupakan perbuatan yang melanggar konstitusi (AD/ART) partai, menjatuhkan nama PPP, melanggar keputusan Mukernas 2 PPP dan surat intruksi DPP PPP No 1109/2013 tentang Intruksi Harian Pemenangan Pemilu.

2. Bahwa sampai saat ini, PPP belum menentukan koalisi kepada partai dan capres manapun, mengingat sesuai amanat Mukernas 2 di Bandung, PPP akan menentukan arah koalisi pencapresan pada Rapimnas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Dengan demikian pernyataan dukungan yang disampaikan oleh Ketua Umum PPP Surydharma Ali kepada Prabowo Subianto pada Hari Jumat 18 April 2014 bertentangan dengan AD/ART partai dengan demikian batal demi hukum
3. Menetapkan penyelenggaraan Rapimnas PPP pada Sabtu 19 April 2014 dengan dihadiri oleh pengurus harian DPP PPP, Ketua DPW PPP se- Indonesia, Ketua Majelis DPP PPP dan Ketua Mahkamah Partai sebagaimana amanat Mukernas 2 PPP di Bandung pada 7-9 Februari 2014.
4. Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah DPP PPP sesuai ketentuan pasal 56 ART PPP secara Bersama-sama sebagai satu - satunya pintu komunikasi politik PPP kepada partai-partai dan bakal capres/cawapres dalam rangka membangun koalisi pencapresan.

5. Menyatakan bahwa seluruh surat keputusan yang beredar terkait pemberhentian keanggotaan dan jabatan Suharso Monoarfa, Fadly Nurzal, Rahmat Yasin, Musyaffa Noer, Amir Uskara, dan Awaluddin TIDAK PERNAH ADA karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP, tidak pernah teradministrasi di kesekjenan DPP PPP, bertentangan dengan semangat islah yang diputuskan oleh rapat PH Majelis Syariah DPP PPP pada 12 April 2014 di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dengan demikian nama-nama sebagaimana tersebut di atas tetap menduduki posisi dan jabatannya.
6. Menyatakan bahwa pengangkatan saudara Djan Faridz sebagai Wakil Ketua umum DPP PPP tidak pernah ada karena bertentangan dengan ketentuan konstitusi (AD/ART) PPP khususnya pasal 12 ART PPP.
7. Menyatakan bahwa reposisi Sekretaris Jendral DPP PPP HM Romahurmuziy sebagaimana beredar dan disampaikan di media massa tidak pernah ada mengingat proses pengambilan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan konstitusi (AD/ART) partai.
8. Memberikan peringatan keras pertama kepada saudara Djan Faridz sebagai anggota PPP agar tidak lagi bertindak merongrong kewibawaan partai dan tidak boleh lagi membangun komunikasi politik atas nama PPP dalam rangka pencapresan.

9. Memberikan peringatan pertama kepada saudara Syaifullah Tamliha untuk tidak lagi menyebarkan berita bohong mengatasnamakan DPP PPP.
10. Memberikan peringatan pertama kepada K.H Nur Muhammad Iskandar agar senantiasa bertindak sesuai dengan konstitusi (AD/ART) PPP dan keputusan partai yang diambil secara sah
11. Memberikan peringatan pertama kepada Ketua Umum DPP PPP H Suryadharma Ali agar tidak memposisikan dirinya di atas konstitusi (AD/ART) PPP, tetap berada pada jalur konstitusi dan prinsip perjuangan partai, demi menjalankan keputusan partai yang diambil secara sah.⁵⁰

Dalam Rapimnas itulah, keluar keputusan pemberhentian sementara terhadap Ketua Umum SDA dan mengangkat Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum. Pemberhentian sementara SDA sebagai ketua Umum dengan alasan SDA telah melakukan 4 pelanggaran yaitu ;

1. Suryadharma Ali menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra pada akhir bulan Maret lalu yang dianggap merendahkan martabat PPP sebagai partai besar dan mapan

⁵⁰ Ach Baidowi, Op.Cit., h.15-17.

2. Suryadharma Ali dianggap melanggar keputusan Mukernas 2 PPP di Bandung, Jawa Barat. Mukernas 2 itu menetapkan tujuh nama bakal capres yang akan didukung PPP, tanpa ada nama Prabowo di dalam daftar tersebut
3. Deklarasi Suryadharma Ali dengan Partai Gerindra atas nama Partai melanggar mekanisme proses pengambilan keputusan partai yang harusnya dilakukan secara musyawarah
4. Ketua Umum Suryadharma Ali dinilai tidak memiliki niat baik untuk melakukan rekonsiliasi. Hal ini terlihat pada keputusan Suryadharma untuk tidak menghadiri Rapimnas.⁵¹

5.1.2 Konflik Hukum

Pemilihan presiden 2014 di menangkan oleh kolisi Indonesia hebat Jowi-Jk dengan perolehan suara 53,15 persen suara, setelah pemilihan presiden tersebut konflik PPP kembali mencuat, konflik menyeruak di internal. Rapat pengurus harian (RPH) DPP PPP pada Rabu 10-9-2014 memutuskan memecat Suryadharma Ali dari Jabatan Ketua Umum.

Pemecatan itu dilakukan karena Suryadharma Ali tidak segera mundur meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi haji. Padahal dalam ketentuan AD ART PPP, Ketua Umum dapat diberhentikan hanya pada saat Muktamar berlangsung, bukan disaat rapat-rapat harian, selain dilakukan dengan tanpa adanya paksaan.

⁵¹ Ibid, h.18.

Keputusan ini diambil karena Suryadharma Ali dinilai telah meruntuhkan citra partai, sehingga diberhentikan. Namun, Suryadharma Ali tidak terima bermanuver balik dengan memecat tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M. , Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi.⁵²

Pada Selasa, 23 September 2014 lalu, Mahkamah PPP menggelar rapat internal di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta. Rapat yang di pimpin oleh ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidy itu untuk menyikapi perpecahan kedua kubu diinternal PPP. Mahkamah Partai telah memutuskan untuk memberikan waktu satu minggu untuk keduanya melakukan islah dan menyatakan bahwa pemberhentian oleh masing-masing pihak tidak sah, dan meminta Suryadharma Ali serta Romahurmuziy menentukan waktu dan tempat Muktamar VIII.

Namun hal itu tidak tercapai, karena pihak Romahurmuziy menggelar Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014, sebelum habis masa islah yang telah ditentukan oleh Mahkamah Partai. Muktamar ini menghasilkan kepengurusan dengan ketua umum Romahurmuziy. Pada tanggal 28 Oktober 2014 Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP yang diajukan pihak Romahurmuziy.

⁵² Feri Arawan, "Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2014-1016". JOM FISIP. Vol. 5 No. 1, April 2018, hal. 8.

Pada 30 Oktober - 2 November 2014 kubu Suryadharma Ali menggelar Muktamar VIII di Jakarta atas usulan dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimun Zubair untuk mengatasi konflik internal partai berlambang Ka'bah dan hasilnya Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum.

PPP kubu Djan faridz mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy hasilnya pada November 2014 PTUN mengeluarkan putusan sela yang meminta pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014, memutuskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly agar menunda pengesahan kepengurusan DPP PPP, setelah PPP versi Muktamar Jakarta mengajukan gugatan pada PTUN karena Menkum HAM telah mengesahkan kepengurusan versi muktamar surabaya di tengah kisruh internal partai berlambang Ka'bah ini.⁵³

Mendengar putusan ini Kubu Romahurmuziy dan Menkumham Yasonna Laoly mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta karena merasa SK tersebut sudah sah berdasarkan Undang - Undang Partai Politik dan berdasarkan AD/ART.

⁵³ Ade Hikmatul Fauziah: *"Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014"* (Jakarta: UIN 2015), Hal 66-67.

Partai Persatuan Pembangunan setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, akhirnya pada tanggal 1 Mei 2015 PT TUN mengeluarkan putusan No. 120/B/2015/PT.TUN.JKT yang mengabulkan eksepsi dari kubu Romahurmuziy.

Majelis hakim mengatakan, dasar pengambilan putusan antara lain bahwa berdasarkan asas praduga *rechmatig* (benar menurut hukum), keputusan badan atau pejabat tata usaha negara harus dianggap tetap sah berlaku sebelum ada putusan yang membatalkannya.

Menurut Majelis hakim, PTUN harusnya menyatakan tidak berwenang untuk menguji apakah tindakan Tergugat atau Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik⁵⁴

Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan PT TUN. Berdasarkan putusan tersebut maka secara otomatis putusan PT TUN dinyatakan batal, artinya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tentang pengesahan perubahan kepengurusan DPP PPP hasil muktamar surabaya dinyatakan tidak sah oleh hukum.

⁵⁴ Muhammad Abi Dzar Al Ghifari dkk, "Penyelesaian Konflik Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik," *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 No. 2, Tahun 2017, hal. 13.

Putusan MA ini menjadi payung hukum yang kuat untuk kubu ketua umum Djan Faridz dan Sekretaris jenderal Ahmad Dimiyati Natakusumah. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung dalam ranah perkara tata usaha negara yang memperkuat keabsahan kubu Djan Faridz, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan putusnya di ranah perkara perdata yaitu putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang menambah kekuatan hukum keabsahan Kepengurusan Djan Faridz dan Dimiyati Natakusumah.

Persoalan konflik kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan semakin rumit. Pemerintah khususnya Menkumham berharap agar konflik segera berakhir dengan cara islah antara kedua kubu yang bersengketa, namun Djan Faridz tetap berusaha keras mengupayakan segala cara baik dengan upaya hukum maupun upaya politik untuk mendapatkan SK Pengesahan Muktamar Jakarta.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly secara tegas kembali menyatakan bahwa Syarat-syarat yang diajukan Djan Faridz tidak memenuhi untuk mendapatkan SK Kepengurusan, sedangkan Menkumham juga tidak bisa membantah keputusan pengadilan karena bisa dikenakan pidana oleh karena itu pada tanggal Januari 2016 Menkumham mengeluarkan Surat Keputusan tentang pencabutan pengesahan Muktamar Surabaya sehingga Kepengurusan PPP sejak saat itu belum ada yang sah menurut pemerintah⁵⁵

⁵⁵ Ibid, h.14

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan agar perselisihan di internal partai politik diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Mahkamah Partai PPP memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik internal ini yaitu melalui muktamar islahalhur hukum dan jalur politik sudah ditempuh tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan konflik, malah justru menambah konflik pada tanggal 8 – 11 April 2016 akhirnya PPP resmi menggelar Muktamar VIII sebagai muktamar islah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Muktamar ini dihadiri oleh kader PPP dari mulai tingkat DPC, DPW, dan DPP. Kepengurusan hasil muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta pun banyak yang hadir, kecuali Ketua Umum Hasil Muktamar Jakarta yaitu Djan Faridz meski Djan Faridz tidak hadir namun kader PPP Muktamar Jakarta banyak yang hadir, ini menunjukkan bahwa muktamar islah ini memang terbuka, hanya saja ada oknum yang masih kurang puas dengan keputusan partai.

Muktamar ini dinilai memenuhi kuorum berdasarkan aturan dalam AD / ART Partai Persatuan Pembangunan setelah muktamar selesai kepengurusan DPP PPP yang baru dengan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai sekretaris Jenderal langsung mengajukan

permohonan SK ke Kementerian Hukum dan HAM dengan membawa hasil-hasil Mukhtar. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly akhirnya mengeluarkan SK tentang Pengesahan Mukhtar Islah Pondok Gede Nomor M.HH06.AH.11.01 Tahun 2016.⁵⁶

Tabel 5.1
Gugatan PTUN terkait SK Kemenkumham
yang mengesahkan kepengurusan Mukhtar Surabaya

Penggugat	Gugatan	Instansi	Tgl Putusan	Putusan	Keterangan
Djan Faridz	Meminta PTUN membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 yang mengesahkan hasil Mukhtar Surabaya	PTUN	6/11/2014	Majelis Hakim PTUN melalui putusan nomor 217/G/2014/PTUN-JKT mengabulkan gugatan Djan Faridz yang menilai Kemenkumham ikut campur dalam konflik internal parpol. Majelis hakim membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014	Pengurus hasil Mukhtar Surabaya Ajukan Banding
Romahur muziy	Meminta majelis hakim membatalkan hasil putusan PTUN	PT TUN		PT TUN Jakarta melalui putusan nomor 120/B/2015/PT TUN JKT menerima permohonan banding Romahurmuziy dan membatalkan Putusan PTUN Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT	Pengurus DPP PPP hasil Mukhtar Jakarta mengajukan kasasi

⁵⁶ Ibid, h. 15

Djan Faridz	Meminta majelis hakim membatalkan hasil putusan PT TUN	MA	20/12/2016	MA membatalkan putusan PT TUN dan menguatkan putusan PTUN Jakarta. Hal ini tertuang dalam Putusan Kasasi TUN 504 K/TUN/2015	Kemenkumham menerbitkan SK Nomor M.HH-01.AH.11.01 tentang SK nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 dan mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Muktamar Bandung 2011
--------------------	--	----	------------	---	--

Tabel 5.2
Gugatan di MK

Penggugat	Gugatan	Instansi	Tgl Putusan	Putusan	Keterangan
Ibnu Utomo, dan Yuli Zulkarnain (Kubu Djan Faridz)	Uji materi pasal 23 dan pasal 33 ayat 2 UU Partai Politik. Yang mana isi dalil permohonan mereka menolak kasasi Romahurmuziy dan membatalkan putusan PN Jakpus oleh PPP Kubu Djan Faridz	MK	25/1/2017	MK dalam putusan nomor 35/PPU- / 2016 tidak mnerima gugatan uji materi UU Parpol karena secara kedudukan hukum, pemohon dinilai tidak memiliki kepentingan	

Tabel 5.3
Gugatan di PN Jakarta Pusat

Penggugat	Gugatan	Instansi	Tgl Putusan	Putusan	Keterangan
Wakil Kamal Ketua Departemen Di DPP PPP Periode 2011-2015	Mengugat hasil Muktamar PPP Surabaya 2014 dan Muktamar Jakarta 2014	PN Jakarta Pusat	19/5/2015	Berdasarkan putusan 88/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst majelis hakim menolak seluruh gugatan	
Madjid Kamil Ketua DPC Rembang	Penggugat intervensi meminta Muktamar Surabaya dibatalkan	PN Jakarta Pusat	19/5/2015	Berdasarkan putusan 88/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst majelis hakim menolak seluruh gugatan	
Madjid Kamil Ketua DPC Rembang	Kasasi MA	MA	2/11/2015	Melalui putusan nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 MA menyatakan susunan kepengurusan DPP hasil Muktamar VIII PPP pada 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta sah	
Romahurmuzy	Peninjauan kembali	MA	12/6/2017	Melalui putusan 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Mengabulkan permohonan pemeriksaan PK dari pemohon serta Membatalkan Putusan MA Nomor 601 K/ Pdt.Sus-Parpol/2015, tanggal 2 November	

Tabel 5.4
Gugatan Tata Usaha Negara Terkait Kepengurusan PPP Tahun 2016-2021
Hasil Mukhtamar Islah

Pengugat	Gugatan	Instansi	Tgl Putusan	Putusan	Keterangan
Djan Faridz	Menggugat SK Menkum HAM Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP Masa Bakti 2016-2021	PTUN	22/11/2016	Putusan PTUN Nomor 97/G/2016/PTUN-Jkt Mengabulkan gugatan PPP kubu Djan Faridz dan meminta Kemenkumham mencabut SK pengesahan kepengurusan Mukhtamar Pondok Gede	Kubu Romy Banding
Romahurmuziy	Banding atas putusan PTUN Nomor 97/G/2016/PTUN-Jkt	PTTUN	6/6/2017	Putusan PT.TUN No.58/B/2017/PT.TUN.JKT mengabulkan banding Romahurmuziy	
Djan Faridz	Kasasi TUN	MA	4/12/2017	Melalui putusan nomer 514 K/TUN/2017,MA menolak kasasi yang diajukan pemohon yang meminta MA membatalkan putusan PT TUN Nomor 58/B/2017/PT.TUN.JKT	
Djan Faridz	PK TUN	MA	8/11/2018	Menolak PK Djan Faridz dengan nomor putusan 182 PK/TUN/2018	Inkrah

5.1.3 Konflik Dualisme

Pada Pemilu Presiden 2014 lalu, PPP bergabung dalam koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung salah satu capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum PPP tersebut, ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh sebagian kader PPP baik di pusat maupun daerah. Kebijakan yang dimiliki oleh Ketua Umum PPP untuk menentukan arah koalisi partai memang sebuah kewenangan dari ketua umum. Namun kebijakan tersebut harus dimusyawarahkan dalam rapat pleno untuk mendapat persetujuan dari seluruh kader.

Dalam rapat pleno tersebut ketua umum PPP tidak memberikan peluang bagi para kader dan simpatisan untuk menyuarakan aspirasi mereka, hal ini menjadikan sebagian kalangan kader PPP baik pusat maupun daerah merasa kecewa akan keputusan tersebut melihat akan hal tersebut, seharusnya setiap anggota Partai Politik dapat mematuhi dan mentaati setiap kebijakan yang telah dibuat oleh Partai.

Namun nyatanya, Kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh Ketua Umum sebuah partai menjadikan sebagian anggota partai belum bisa menerima dan memenuhi seluruh peraturan yang ada didalam partai tersebut sehingga dengan mudahnya menimbulkan konflik didalam internal suatu partai tindakan yang dilakukan oleh sebagian petinggi dan kader PPP untuk melawan dan menentang arah koalisi partai ternyata menimbulkan konflik.

Menurut Ramlan Subakti, (2010: 75) “bahwa konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang tak berwujud kekerasan”. sehingga membuat PPP mengalami dualisme kepengurusan DPP PPP. Sehingga kubu yang menentang mencari segala cara dan alasan untuk menentang keputusan ketua umum partai. Salah satunya dengan menggunakan isu ketua umum yang tersangkut kasus hukum dugaan korupsi saat beliau menjabat sebagai menteri.

Hal ini menimbulkan inisiatif dari kubu yang menentang membuat alasan untuk menyelamatkan partai dengan cara membuat Mukthamar surabaya untuk memilih ketua umum pengganti Surya Dharma Ali, hasil dari mukthamar ini yang terpilihlah Romahurmuziy sebagai ketua umum pengganti Surya Dharma Ali.

Hal tersebut ditentang oleh ketua umum yang masih menjabat yaitu Surya Dharma Ali dengan menyatakan mukthamar tersebut ilegal. Sehingga Surya Dharma Ali yang masih menjabat ketua umum partai membuat muktamar tandingan dijakarta, dengan terpilihnya Djan Faridz sebagai ketua umum yang baru menggantikan Surya Dharma Ali.⁵⁷

⁵⁷ Rizky Fazila, Maimun, “ Dualisme Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Menjelang Pilkada Serentak 2017” , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol.2 No. 2 (Mei,2017), hal. 493-494.

Hal tersebut, sangat jelas terlihat disini dengan adanya dualisme di tubuh PPP menimbulkan perebutan kekuasaan, dengan mengedepankan kepentingan pribadi antara petinggi partai dari kelompok-kelompok yang berseteru untuk menguasai PPP. Imbas dari permasalahan dualisme ini memiliki dampak tidak adanya arah politik PPP.

Kasus konflik dan perpecahan yang menimpa PPP menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survie Independen Nusantara (LSIN), Yasin Mohammad, dipicu oleh beberapa alasan: Pertama, kubu internal yang tidak menggunakan sistem demokrasi. Kedua, adanya faksi-faksi di internal partai. Perjalanan politik memang tidak akan terlepas setidaknya dari tiga hal, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan konflik. Konflik internal PPP yang disebabkan oleh adanya pertarungan dua kubu dalam memperebutkan kursi ketua umum tidak terhenti pada proses pemilihan ketua, tetapi juga berlanjut pada munculnya perpecahan pengurus di tubuh internal partai.

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, konflik internal dan dualisme kepengurusan memunculkan fenomena adanya dua rekomendasi yang berbeda dalam pemberian dukungan calon kepala daerah, kondisi ini menimbulkan kebingungan massa pendukung di akar rumput, sebab bagi mereka menjadi tidak jelas perihal pihak mana yang harus diikuti (Undang & Thamrin, 2016).

Bahwa perpecahan kepengurusan internal partai yang terjadi di pusat menurut Nasir (2016) tidak hanya mempengaruhi turunnya kekuatan politik di level nasional tetapi juga di daerah⁵⁸

5.1.4 Menurunnya Perolehan Nasional

Dahulu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai sebagai partai tua adan tradisional akan tetapi, semakin bertumbuhnya partai nasionalis relegius, partai-partai yang dahulu mengandalkan *platform* agama mulai mengubah dan menyesuaikan dengan dinamika politik yang ada.

PPP pun sudah berubah bukan hanya Islam saja tapi juga nasionalis. PPP berusaha ingin mengubah stigma yang pada awalnya dinilai sebagai partai tua dan tradisional, menjadi partai muda dan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional.

Partai ini pun bertekad untuk mendapatkan posisi tiga besar pada pemilu legislatif 2019 dan memiliki target 66 kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).Namun, PPP trus mengalami penurunan perolehan suara dari tahun ke tahun pemilu.

Pada pemilu 1999 sampai Pemilu 2019 PPP mengalami penurunan suara yang signifikan, pada Pemilu 1999 PPP mendapatkan 12,16% suara, pada pemilu 2004 PPP mendapatkan 10,61% suara, pada Pemilu 2009 PPP mendapatkan 4,95% suara, pada Pemilu 2014.

⁵⁸ Yusa Djuyandi, Sayyid M. Suparman, "Konflik Internal PPP Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018", Jurnal Civic Hukum. Vol.5 No. 2, (November,2020), hal. 178.

PPP mendapatkan 9,04% suara, dan pada Pemilu 2019 PPP mendapatkan 4,52% suara.⁵⁹ Menurunnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan secara nasional pada Pemilu 2019 tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi seperti yang disampaikan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Menurut Suharso, pengembosan dilakukan di lumbung suara PPP selama ini. Lumbung suara itu berada di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Ketiga daerah tersebut juga merupakan basis suara Prabowo-Sandiaga dan para partai pendukungnya. Ia mengatakan, PPP digembosi dengan isu-isu negatif bahkan kampanye hitam.

Salah satunya terkait dengan kasus korupsi yang menjerat eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain itu, PPP juga dilekatkan dengan atribusi partai penista agama. Ini lantaran PPP pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendukung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. "Tadinya kami pikir itu enggak akan terganggu sama sekali, tapi begitu masif, terstruktur ke bawah," kata Suharso.⁶⁰

⁵⁹ Hapsah Nur Habibah, Skripsi: "*Marketing Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada Pemilu Legislatif 2019*", (Jakarta: UIN, 2020), hlm. 3-4.

⁶⁰ Dimas Djarot Bayu, "*Elektabilitas Menurun, PPP Merasa Digembosi di Lumbung Suara*", <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5e9a51a637610/elektabilitas-menurun-ppp-merasa-digembosi-di-lumbung-suara>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pada pukul 03.00.

5.2 Dualisme Kepemimpinan Kota Depok dan Penurunan kursi

5.2.1 Dualisme Kepemimpinan Kota Depok

Konflik pada Partai Persatuan Pembangunan berawal dari konflik kebijakan yaitu konflik yang muncul karena seorang individu atau kelompok tidak sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan organisasi seperti kebijakan Suryadhaema Ali selaku Ketua Umum ikut bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP), dimana keputusan tersebut dianggap tidak mewakili seluruh aspirasi anggota Partai Persatuan Pembangunan dan konflik ini berdampak buruk keseluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Kota di seluruh Indonesia.

Pada faktanya konflik PPP bisa digolongkan kepada konflik positif, sebagaimana yang dungkapkan Ramlan Subakti, konflik positif adalah konflik yang tak mengancam eksistensi system politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati Bersama dengan konstitusi.

Mekanisme yang dimaksud ialah Lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan pemerintah, pers dan forum-forum terbuka yang lain tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui Lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif.

Meskipun demikian konflik PPP melahirkan dampak tersendiri bagi PPP. Pertama elektabilitas terus menurun. Suara PPP pasca konflik mulai merosot, konflik tersebut membuat petaka untuk kekuatan konsolidasi diinternal partai.

Walaupun Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy mengklaim bahwa ada sisi positif yang melanda partainya. Romahurmuzy menyebutkan imbas konflik di internal partai, pihaknya semakin rajin melakukan konsolidasi politick di akar rumput partai. Namun klaim konsolidasi yang disuarakan nyatanya tidak memberi efek bagi konsolidasi dan solidaritas internal partai.

Pilkada serentak di 101 daerah menjadi pembuktian narasi politik yang dibingkai oleh para elit PPP tidak efektif sampai di akar rumput. Ketidaksinkronan antara harapan elit partai di sisi lain dan harapan kader di tingkat bawah merupakan imbas dari adanya jarak komunikasi politik antara elit.

Kedua perpecahan suara pada Pilkada serentak, komunikasi politik yang dilakukan oleh kedua kubu PPP membuat suara PPP dalam Pilkada Tahun 2017 lalu terpecah. Karena mereka saling mengklaim didukung oleh organisasi partai PPP. Banyak calon daerah yang menggunakan dukungan dari PPP bermasalah.⁶¹

⁶¹ Yusa Djuyandi dan Sayyid M.Suparman, "Konflik Internal PPP Di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018", Jurnal Civic Hukum, Vol.5 No. 2 (November 2020), Hal 176-190.

Dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan Kota Depok tidak terpengaruh oleh kisruh dualisme kepemimpinan di tingkat pusat. Hal ini diungkapkan oleh Mamun Abdullah S.T. :

*“ Alhamdulillah PPP Kota Depok tetap solid, tidak ada perpecahan sedikit pun apalagi dualisme kepemimpinan karena sikap DPC PPP Kota Depok berada pada dua sisi yaitu kubu Romy dan kubu Djan Faridz, dan tetap berpatokan kepada sk yang sah dari Menkumham.”*⁶²

Meskipun PPP Kota Depok tidak terjadi dualisme kepemimpinan akan tetapi konflik dualisme kepemimpinan pusat sangat berdampak terhadap hasil pemilu 2019 di Kota Depok, hal tersebut dijelaskan oleh Sekretaris DPC PPP Kota Depok :

*“ sangat berdampak karena berlarut-larutnya dualisme kepemimpinan di DPP PPP membuat kader-kader di tingkat pengurus maupun di tingkat akar rumput banyak yang pindah ke partai lain yang pada akhirnya mengurangi perolehan suara PPP Kota Depok pada pileg 2019”*⁶³

⁶² Wawancara dengan Ma'mun Abdullah, Depok, 11 Januari 2022

⁶³ Wawancara dengan Sekretaris DPC PPP Kota Depok, 19 Januari 2022

Gambar 5.1
Peresmian Kantor DPC PPP Kota Depok



5.2.2 Kekuatan dan Kelemahan Kampanye Politik Kota Depok

1. Kekuatan

a. Referent power

Referent power yang ada pada PPP Kota Depok masih menjadi kekuatan menarik kalangan pemilih tradisional.

Kutipan wawancara dengan Mamun Abdullah S.T:

“Yang kita tonjolkan atau kita branding lebih kepada figur-figur lokal atau local strongmen seperti Kyai Damanhuri di Sawangan, Ustadz Sarbini di Cinere dan Royani sebagai tokoh senior PPP di Gandul, itu kita tonjolkan saja biar pemilih lama dapat terenyuh kembali”⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Ma'mun Abdullah S.T, Depok 11 Januari 2022

Referent power yang dimaksud adalah para kyai-kyai lokal yang masih di PPP dan tokoh-tokoh lokal PPP. Mereka ini masih menjadi pendulang suara PPP di Depok

b. Figur Ketua umum PPP Kota Depok

Hj. Qonita Luttfiah, SE, MM sebagai anak dari K. H. Syukron Ma'mun menjadi kekuatan PPP Kota Depok dalam menarik hati pemilih pada pemilu pileg 2019 Kutipan wawancara dengan Sekretaris DPC Kota Depok *“kita melakukan kampanye politik melalui banner, baleho, pamphlet, dan media lainnya memang kita tonjolan itu sosok Ketua umum kita Hj. Qonita sebagai tokoh di Kota Depok”*⁶⁵

2. Kelemahan

a. Tersandung kasus/efek penangkapan Romahurmuzy sebagai Ketua Umum DPP PPP

Menjelang pemilu legislatif 2019 Romahurmuzy sebagai Ketua Umum DPP PPP tertangkap KPK terkait kasus korupsi. Kasus ini membuat PPP Kota Depok kesulitan dalam mengcounter isu ini kekonstituennya

Hal ini diungkapkan oleh Ma'mun Abdullah. S. T.

“faktor penghambat selain konflik juga kasus tertangkapnya Romahurmuzy yang membuat arah kebijakan politik terutama soal programnya serta segmen pemilih mana yang ingin disasar yang

⁶⁵ Wawancara dengan sekretari DPC Kota Depok, Depok 19 Januari 2022

pada akhirnya banyak konstituen berbalik dukungan ke partai lain”⁶⁶

Gambar 5.2
Tertangkapnya Ketua Umum PPP



b. Tidak optimal dalam membangun komunikasi ke public

PPP Kota Depok tidak optimal membangun komunikasi dengan publik sehingga perubahan yang dilakukan PPP Depok tidak terasa Hal ini dijelaskan oleh Ma'mun Abdullah. S. T.

*“saya melihat PPP pada pileg 2019 memang punya kecenderungan tidak ada perubahan dalam strategi politik atau tidak ada usaha yang secara serius dilakukan untuk memperbaiki cara PPP berkomunikasi ke publik terutama para caleg termasuk saya sendiri yang kurang mensosialisasikan visi misi partai dan gagap dalam mengcounter isu korupsi oleh Ketua Umum DPP PPP”*⁶⁷

c. Gagal mengadaptasi perubahan

⁶⁶ Wawancara dengan Ma'mun Abdullah S.T, Depok 20 Januari 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Ma'mun Abdullah S.T, Depok 20 Januari 2020

PPP yang mulanya dinilai sebagai partai tua dan tradisional ingin merubah menjadi partai muda dan modern. Akan tetapi, itu tidak mudah untuk internal PPP Depok dan pemilih PPP Depok yang diisi oleh kader-kader lama. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris DPC PPP Kota Depok *“PPP itu kan selalu dinilai partai tua dan tradisional nah kita di Depok ingin merubah nilai itu ini sesuai dengan strategi DPP PPP yang kebetulan ketuanya itu gus Romy yang milenial, dan ternyata itu tidak mudah bagi karakter pemilih PPP di Depok yang cenderung tradisional”*⁶⁸

d. Kurang berhasil melakukan inovasi dalam Menyusun program kampanye PPP Depok masih memakai cara lama dalam melakukan kampanye Hal ini di jelaskan oleh Ma'mun Abdullah S. T. *“PPP Depok kurang berhasil melakukan inovasi program-program kampanye yang dilakukan secara terukur dan terencana, inovasi kampanye tidak kelihatan masih model lama dan menyerahkan program kampanye kepada caleg di dapil masing-masing dan tidak ada bedanya dengan kampanye politik 2014 seharusnya PPP Kota Depok mendesain arah kampanyenya, pesannya apa, dan segmennya apa yang disasar”*⁶⁹.

⁶⁸ Wawancara dengan Sekretaris DPC PPP, Depok 19 Januari 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Ma'mun Abdullah S.T, Depok 20 Januari 2020

5.2.3 Stigma Mendukung Non Muslim Pilkada DKI

Selain kampanye politik yang lemah pada pileg 2019 PPP Depok dihadapkan dengan atribut partai penista agama. Ini lantaran PPP pada Pilkada DKI 2017 mendukung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Meskipun PPP pada putaran pertama mendukung AHY dan Selvy.

Hal ini dijelaskan oleh Ma'mun Abdullah S.T

“sangat terganggu sekali, isu ini sangat masif, terstruktur ke bawah dan kami sebagai pengurus DPC PPP Kota Depok harus bisa memberi pemahaman ke bawah bahwa sesungguhnya PPP tidak mendukung Ahok, karena persoalan dualisme kepemimpinan maka ada salah satu kubu mendukung, padahal surat dukungannya tidak sah. PPP yang sah mendukung AHY dan selvy setelah itu tidak ada dukungan lagi ke calon yang lain dan kita hanya menjelaskan tidak ada trik khusus untuk mencounter isu itu ditambah lagi dengan dukungan pilpres yang sangat sensitif karena terbelahnya dukungan pilpres dan Gerakan 212 hal itu membuat PPP Depok tidak banyak bergerak dan dikembalikan kembali ke caleg di masing dapil”⁷⁰

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh stigma partai PPP sebagai partai penista agama maka peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat. Wawancara dengan Mayong Bobby:

⁷⁰ Wawancara dengan Ma'mun Abdullah S.T, Depok 20 Januari 2020

“iya, saya sangat familiar dengan partai PPP karena mereka adalah partai yang selalu memperjuangkan nilai-nilai islam dan masyarakat sini dari dulu selalu dukung partai PPP. Tapi semenjak adanya dukungan terhadap calon gubernur untuk pilkada DKI dan saya menganggap calon itu telah menista agama islam saya jadi tidak respek lagi dengan PPP karena seharusnya sebagai partai yang berasaskan islam seharusnya tidak mendukung calon tersebut”⁷¹

Dengan adanya stigma partai penista agama pada Pilkada DKI. PPP Depok merasa di gembosin dengan isu-isu negatif bahkan kampanye hitam dan membuat suara PPP Depok menurun dibandingkan 2014.

Tabel 5.5
Suara Partai dan kursi PPP Kota Depok 2014

	2014
Dapil 1 (Kec.Cimanggis)	7,508
Dapil 2 (Kec.Cilodong, Kec. Tapos)	6,855
Dapil 3 (Kec.Cipayung,Kec.Sawangan,Kec.Bojongsari)	21,559
Dapil 4 (Kec.Limo,Kec.Cinere,Kec.Beji)	10,496
Dapil 5 (Kec.Sukmajaya)	5,869
Dapil 6 (Kec.Pancoran Mas)	7,877
Total	60,164
Kursi	4

Sumber : Data diambil dari web resmi KPU RI

⁷¹ Wawancara dengan Mayonk Boby, Depok 28 Januari 2020

Tabel 5.6
Suara Partai dan Kursi PPP Kota Depok 2019

	2019
Dapil 1 (Kec.Pancoran Mas)	10,423
Dapil 2 (Kec.Cinere, Kec.Limo, Kec.Beji)	5,252
Dapil 3 (Kec.Cimanggis)	2,632
Dapil 4 (Kec.Sukmajaya)	2,295
Dapil 5 (Kec.Tapos, Kec. Cilodong)	5,137
Dapil 6 (Kec.Sawangan,Kec.Bojongsari,Kec.Cipayung)	15,795
Total	41,534
Kursi	2

Sumber : Data diambil dari web resmi KPU RI

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis data mengenai menurunnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok pada Pemilu Legislatif 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik atau dualisme kepemimpinan di DPP PPP yang berlarut-larut
2. Tertangkapnya Ketua Umum DPP PPP dalam kasus korupsi
3. Gagal dalam membangun komunikasi yang baik ke konstituen
4. Tidak bisa beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan pemilih milenial
5. Tidak bisa mencounter atau menjelaskan dengan baik kepada konstituen tentang stigma partai pendukung non muslim atau partai penista agama

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti yang mana bertujuan agar diharapkan mampu memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok sebagai berikut:

1. Agar dalam penyusunan dan penerapan strategi kampanye politik harus mengetahui dahulu apa saja yang ingin dicapai, dan siapa yang menjadi sasaran, pesan apa yang disampaikan, bagaimana menyampaikannya serta bagaimana mengevaluasinya.

2. Sehingga dalam perencanaan kampanye politik dapat terorganisir dan terukur dan dapat menciptakan citra positif. Selain itu DPC PPP Kota Depok agar jeli dan kritis dalam menghadapi perubahan-perubahan isu dan gejala-gejala masyarakat apa yang mereka harapkan dan mereka butuhkan. Sehingga nantinya dalam menyusun dan menerapkan strategi partai dengan tepat.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mempertajam lagi fokus kajian dengan meneliti kasus-kasus yang terjadi di DPC PPP Kota Depok.